



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI, RISET DAN INOVASI, SERTA INDUSTRI)**

Tahun Sidang	: 2022 – 2023
Masa Persidangan	: II
Rapat	: Ke - 7 (Tujuh)
Jenis Rapat	: Rapat Audiensi
Dengan	: Pimpinan dan Anggota Pansus Batubara DPRD Kab. Lahat Prov. Sumsel
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 14 November 2022
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d 15.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan <i>virtual</i>
Acara	: Audiensi
Ketua Rapat	: H. Yulian Gunhar, SH., MH (Anggota Komisi VII DPR RI/ F.PDI Perjuangan)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadi	: A. Pemerintah

- Pimpinan dan Anggota Pansus Batubara DPRD Kab. Lahat Prov. Sumsel

B. 21 Orang Anggota dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR RI terdiri dari:

8 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik

13 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual

30 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Audiensi Komisi VII DPR RI pada Hari Senin, 14 November 2022 dibuka pukul 13.10 WIB, dipimpin oleh H. Yulian Gunhar, SH., MH, selaku Ketua Rapat Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Audiensi Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - Audiensi

II. CATATAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendukung Anggota Pansus Batubara DPRD Kabupaten Lahat untuk melakukan evaluasi terhadap permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh Perusahaan Tambang Batubara di Kabupaten Lahat, termasuk permasalahan perbaikan jalan yang sudah ada dan pembukaan jalan baru yang khusus diperuntukkan untuk Perusahaan Tambang yang beroperasi di Kabupaten Lahat.
2. Komisi VII DPR RI mendukung Anggota Pansus Batubara DPRD Kabupaten Lahat untuk berkoordinasi langsung dengan Perusahaan Tambang Batubara di Kabupaten Lahat dalam rangka menyelesaikan permasalahan kontribusi pendapatan daerah (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Galian C, Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)), kemanfaatan CSR dan isu ketenagakerjaan di Kabupaten Lahat.
3. Komisi VII DPR RI mendukung diadakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Panja Illegal Mining Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pansus Batubara DPRD Kabupaten Lahat dan 34 Perusahaan Batubara yang beroperasi di Kabupaten Lahat, untuk memberikan laporan dan data terkait permasalahan pertambangan yang ada di Kabupaten Lahat.
4. Komisi VII DPR RI mendukung Anggota Pansus Batubara DPRD Kabupaten Lahat untuk dapat meningkatkan komunikasi yang lebih baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mengkoordinasikan berbagai permasalahan yang ada.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 15.30 WIB

Jakarta, 10 November 2022

KETUA RAPAT,

RIYULIAN GUNHAR, SH., MH

A-148